

Manipulasi Data Pemilih Bisa Dipidana

dan penelitian (coklit) data pemilih. Pasalnya, sanksi pidana menunggu jika KPU dan jajarannya tidak menjalankan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi mengatakan, verfak dan coklit data pemilih merupakan tahapan untuk memastikan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, tidak boleh ada manipulasi saat prosesnya. Sebab ketika data masuk ke KPU yang bersangkutan tidak mengetahui sama sekali, maka salah satu fungsi verifikasi faktual dalam memastikannya.

"Sebab ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan agar hak konstitusional sekaligus hak asasi manusianya sebagaimana diatur di undang-undang 39 tentang HAM," katanya.

Menurutnya, verifikasi faktual itu mutlak harus dilaksanakan. Tidak boleh ada satu warga negara yang telah memenuhi syarat tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena meskipun di undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bisa menggunakan KTP, akan ditemukan perlakuan diskriminasi bagi warga yang tidak masuk dalam DPT.

"Mengapa harus masuk dalam DPT. Karena akan ditemukan perlakuan diskriminasi bagi warga tidak masuk DPT meskipun bisa menggunakan KTP," ujarnya.

Perlakuan diskriminasinya, kata dia, ialah adanya perbedaan yang tidak memiliki surat undangan bisa mulai pukul 7 pagi, sedangkan yang menggunakan KTP baru bisa memilih pada jam 12 siang. "Kami dari Bawaslu harus memastikan pengawasan verfak dan coklit ini. Sesuai prosedur.

Jika KPU dan jajaran ke bawahnya tidak melaksanakannya maka sanksi pidana menanti sesuai UU Pilkada," ucapnya.

Ketua Bawaslu Karawang Kursin Kurniawan menyatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan rapat kerja teknis (rakernis) pengawasan coklit data pemilih. Kegiatan ini diikuti oleh semua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang ada di 30 kecamatan. "Kegiatan ini dilakukan sehari, kami juga menggunakan protokol kesehatan dalam rapat ini agar membantu pemerintah memutus mata rantai covid 19," katanya.

Tujuan kegiatan ini, kata Kursin, agar Panwascam tahu tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan coklit data pemilih yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya. "Kami berharap kegiatan ini bisa meningkatkan

kemampuan Panwascam dalam melakukan pengawasan," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Karawang Kasum Sanjaya mengatakan, pihaknya memastikan akan melaksanakan agenda coklit sesuai dengan regulasi dan standar covid 19. Ia juga mengatakan jika KPU Kabupaten Karawang sudah melakukan bimtek terhadap para petugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

"Terutama untuk coklit kita akan laksanakan sesuai regulasi. Karena untuk verfak sudah dilakukan. Intinya kita siap melaksanakan tahapan dan dipastikan sesuai dengan regulasi yang ada, apalagi selalu ada dalam pengawasan Bawaslu, Panwascam dan PKD sehingga seluruh tahapan dapat berjalan dengan lancar," tandasnya. (nce)